

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Meneliti

1. Gambaran Umum Kabupaten Morowali Utara

Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dibantu oleh beberapa OPD, sebagai pengguna anggaran OPD yang bersangkutan menjalankan tugasnya dengan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugas. Setiap OPD membantu pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam pengelolaan keuangan daerah.

OPD Kabupaten Morowali Utara memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertahanan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah menyelenggarakan urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub Urusan Kebakaran;
- f. Dinas Sosial Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;

- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dan bidang Persandian;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

- p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan daerah menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sub bidang Perindustrian dan sub bidang Perdagangan;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

2. Sejarah Kabupaten Morowali Utara

Kabupaten Morowali Utara (bahasa Inggris: *North Morowali Regency*), adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi Morowali Utara terletak di Kolonodale. Morowali Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 15 Mei 2013 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB).

3. Geografis Wilayah Kabupaten Morowali Utara

Secara geografis, Kabupaten Morowali Utara terletak pada 1°31' - 3°04' Lintang Selatan dan 121°02' - 123°15' Bujur Timur.

Topografi wilayahnya mulai dari pesisir, dataran rendah, hingga bergunung-gunung yang merupakan bagian dari Pegunungan Pompangeo, Paa-Tokala, Peleru dan Pegunungan Rerende dengan ketinggian wilayah antara 0-2.500 meter di atas permukaan air laut (mdpl).

Wilayahnya termasuk beberapa pulau kecil di Teluk Towuri dan Teluk Tolo di laut Banda seperti pulau Pangia, pulau Tokonanaka, pulau Tokobae dan lain-lain. Gunung tertinggi di Kabupaten Morowali Utara adalah Gunung Pompangeo (2.590 mdpl) di pegunungan Pompangeo. Sedangkan sungai terbesar dan terpanjang di kabupaten ini adalah sungai La'a yang memiliki panjang sekitar 96,30 km.

4. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara 2020, penduduknya berjumlah 128.323 jiwa, dengan kepadatan 12,83 jiwa/km². Penduduk Morowali Utara terdiri dari bermacam suku bangsa, sehingga termasuk sebagai kabupaten yang multicultural. Penduduknya juga cukup beragam dalam keagamaan. Data dari Kementerian Agama, sekitar 52,82% (66.981 jiwa) memeluk agama Islam. Pemeluk agama Kristen juga cukup signifikan yakni 44,77% (56.771 jiwa), dimana Protestan 39,62% (50.239 jiwa) dan katolik 5,15% (6.532 jiwa). Kemudian Hindu 2,23% (2.825 jiwa) dan sebagian kecil beragama Buddha yakni 0,18% (222 jiwa).

5. Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara

Visi Kabupaten Morowali Utara :

“Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang sehat, Cerdas, dan Sejahtera”

Misi Kabupaten Morowali Utara :

- a. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah.
- e. Meningkatkan kapasitas aparatur.
- f. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pada penelitian kuesioner yang disebarakan sebanyak 95 pada 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali Utara. Total kuesioner yang dibagikan adalah 95 kusioner (100%).

Jumlah kuesioner yang kembali juga sebanyak 95 kuesioner. Rincian pengembalian kuesioner oleh para responden adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah kuesioner yang dibagikan	95
2.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0
3.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	95

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

b. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala OPD, Sekretaris OPD yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara. Berikut ini adalah gambaran mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan pada perilaku seseorang. Dalam suatu bidang kerja jenis kelamin seringkali dapat menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan individu.

Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ada perbedaan yang konsisten antara laki-laki dan perempuan dalam memecahkan masalah, keterampilan

analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas atau kemampuan belajar.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 10
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	43	45.3%
2.	Perempuan	52	54.7%
Jumlah		95	100%

Sumber : Data Primer Yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa hasil penelitian dari 95 responden yang merupakan pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari 43 (45.3%) laki-laki dan 52 (54.7%) perempuan.

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur dalam keterkaitannya dengan kinerja individu dilokasi kerja biasanya adalah sebagai gambaran akan pengalaman dan tanggungjawab individu.

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 11
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia Responden	Jumlah Responden	Presentase
23-27	28	29%
28-35	48	51%
Di atas 35	19	20%
Jumlah	95	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat umur pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki tingkat umur 28-35 tahun sebanyak 48 (51%) responden, tingkat umur 23-27 tahun sebanyak 28 (29%) responden, sedangkan di atas 35 tahun sebanyak 19 (20%) responden.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan seringkali dipandang sebagai satu kondisi yang mencerminkan kemampuan seseorang. Tingkat pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu SMA, Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana.

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 12
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SMA	29	30.5%
2.	Sarjana	62	65.3%
3.	Pascasarjana	4	4.2%
Jumlah		95	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 12 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 29 (30.5%) responden, tingkat pendidikan Sarjana

sebanyak 62 (65.3%) responden, sedangkan Pascasarjana sebanyak 4 (4.2%) responden.

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Dinas dan Badan

Karakteristik pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menjadi responden berdasarkan Nama Dinas dan Badan dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini :

Tabel 13
Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Dinas dan Badan

No	Nama Dinas dan Badan	Total	Presentase
1	Sekretariat DPRD	4	4.2%
2	Inspektorat Daerah	4	4.2%
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	4.2%
4	Badan Pendapatan Daerah	4	4.2%
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4	4.2%
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4.2%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	4.2%
8	Badan Kesatuan dan Bangsa Politik daerah	4	4.2%
9	Dinas Sosial Daerah	4	4.2%
10	Dinas Kesehatan Daerah	4	4.2%
11	Dinas Perhubungan Daerah	4	4.2%
12	Dinas Perikanan Daerah	3	3.2%
13	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	3	3.2%
14	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	3	3.2%
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	3	3.2%
16	Dinas Perpustakaan Daerah	4	4.2%
17	Dinas Pariwisata dan Olahraga Daerah	3	3.2%
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	4	4.2%
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	4	4.2%
20	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah	4	4.2%
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	4	4.2%
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4.2%

	Daerah		
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	4.2%
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	4	4.2%
25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah	4	4.2%
Total		95	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dari 95 responden, diperoleh Sekretariat DPRD sebanyak 4 (4.2%) responden, Inspektorat Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Badan Pendapatan Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Badan Penanggulangan Bencana daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Badan Kesatuan dan Bangsa Politik Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Sosial Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Kesehatan Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Perhubungan Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Perikanan Daerah sebanyak 3 (3.2%) responden, Dinas Pertanian dan pangan Daerah sebanyak 3 (3.2%) responden, Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebanyak 3 (3.2%) responden, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah sebanyak 3 (3.2%) responden, Dinas Perpustakaan daerah sebanyak 4 (4.2%)

responden, Dinas Pariwisata dan Olahraga Daerah sebanyak 3 (3.2%) responden, Dinas Komunikasi dan informatika Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Koperasi Usaha mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebanyak 4 (4.2%) responden, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman daerah sebanyak 4 (4.2%) responden.

5) Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik pegawai Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara yang menjadi responden berdasarkan mas kerja dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini :

Tabel 14
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Total	Presentase
1.	5 tahun	76	80.0%
2.	7 tahun	1	1.1%
3.	8 tahun	1	1.1%
4.	10 tahun	17	17.9%
Jumlah		95	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari responden yang memiliki masa kerja dalam jangka waktu 5 tahun sebanyak 76 (80.0%) responden, 10 tahun sebanyak 17 (17.9%) responden, 7 tahun sebanyak 1 (1.1%) responden dan 8 tahun sebanyak 1 (1.1%) responden.

2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Dengan membandingkan nilai r hitung dari hasil output (*Corrected Item-Total Correlation*) dengan r tabel, jika r hitung lebih besar dari r tabel maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2016).

Tabel 15
Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan		Pearson Corelation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X1	X1.1	.541**	.000	VALID
	X1.2	.443**	.000	VALID
	X1.3	.579**	.000	VALID
	X1.4	.491**	.000	VALID
	X1.5	.597**	.000	VALID
	X1.6	.634**	.000	VALID
	X1.7	.583**	.000	VALID

	X1.8	.573**	.000	VALID
X2	X2.1	.687**	.000	VALID
	X2.2	.729**	.000	VALID
	X2.3	.578**	.000	VALID
	X2.4	.717**	.000	VALID
	X2.5	.597**	.000	VALID
Y	Y.1	.860**	.000	VALID
	Y.2	.421**	.000	VALID
	Y.3	.777**	.000	VALID
	Y.4	.812**	.000	VALID
	Y.5	.452**	.000	VALID
	Y.6	.786**	.000	VALID
	Y.7	.844**	.000	VALID
	Y.8	.812**	.000	VALID

Sumber : Data primer yang diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 15 diketahui bahwa variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai r tabel.

b. Uji Realibilitas

Tabel 16
Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
X1	.674	Reliabel
X2	.681	Reliabel
Y	.878	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Hasil uji rebilitas pada tabel 16, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sehingga berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, dapat menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas tinggi, hal ini membuktikan dengan nilai

Cronbach Alpha >0,60, jadi hasil ukur yang didapatkan dapat dipercaya.

3. Deskriptif Penelitian

Tabel 17
Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)

Item/ Pernyataan/ indikator	Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%)										rata- rata (Mean)
	1		2		3		4		5		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X1.1	0	0.0	0	0.0	12	12.6	50	52.6	33	34.7	4.22
X1.2	0	0.0	0	0.0	23	24.2	42	44.2	30	31.6	4.07
X1.3	0	0.0	0	0.0	12	12.6	54	56.8	29	30.5	4.18
X1.4	0	0.0	0	0.0	10	10.5	51	53.7	34	35.8	4.25
X1.5	0	0.0	0	0.0	6	6.3	44	46.3	45	47.4	4.41
X1.6	0	0.0	0	0.0	9	9.5	39	41.1	47	49.5	4.40
X1.7	0	0.0	1	1.1	11	11.6	49	51.6	35	36.8	4.25
X1.8	0	0.0	0	0.0	18	18.9	40	42.1	36	37.9	4.17
RATA RATA INDIKATOR VARIABEL PENERAPAN SEKTOR PUBLIK (X1)											4.2438

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 17 jawaban responden terhadap pernyataan variabel Penerapan Akuntansi sektor Publik (X1), diketahui bahwa 95 responden sebagian besar menjawab pilihan setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Tabel 18
Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)

Item/ Pernyataan/ indikator	Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%)										rata- rata (Mean)
	1		2		3		4		5		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X2.1	0	0.0	0	0.0	16	16.8	49	51.6	30	31.6	4.15
X2.2	0	0.0	0	0.0	17	17.9	50	52.6	28	29.5	4.12
X2.3	0	0.0	0	0.0	14	14.7	51	53.7	30	31.6	4.17
X2.4	0	0.0	0	0.0	16	16.8	48	50.5	31	32.6	4.16
X2.5	0	0.0	0	0.0	6	6.3	51	53.7	38	40.0	4.34
RATA RATA INDIKATOR VARIABEL PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (X2)											4.1880

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 18 jawaban responden terhadap pernyataan variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2), diketahui bahwa 95 responden sebagian besar menjawab pilihan Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Tabel 19
Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)

Item/ Pernyataan/ indikator	Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%)										rata- rata (Mean)
	1		2		3		4		5		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y1.1	0	0.0	0	0.0	23	24.2	27	28.4	45	47.4	4.23
Y1.2	0	0.0	0	0.0	8	8.4	48	50.5	39	41.1	4.32
Y1.3	0	0.0	0	0.0	26	27.4	27	28.4	42	44.2	4.16
Y1.4	0	0.0	0	0.0	25	26.3	29	30.5	41	43.2	4.16
Y1.5	0	0.0	0	0.0	7	7.4	47	49.5	41	43.2	4.35
Y1.6	0	0.0	1	1.1	21	22.1	36	37.9	37	38.9	4.14
Y1.7	0	0.0	0	0.0	21	22.1	28	29.5	46	48.4	4.26
Y1.8	0	0.0	0	0.0	25	26.3	29	30.5	41	43.2	4.16
RATA RATA INDIKATOR VARIABEL AKUNTABILITAS KINERJA INSTASI PEMERINTAH (Y)											4.2289

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 19 jawaban responden terhadap pernyataan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y), diketahui 95 responden sebagian besar menjawab pilihan Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 20
Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error	Betta		
1	(Constant)	-.391	.511		-.765	.446
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	.368	.127	.241	2.896	.005
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	.731	.107	.568	6.829	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

$$Y = a + b_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -.391 + 0.368 X_1 + 0.731 X_2 + e$$

Hasil dan pembahasan regresi diatas adalah :

- 1) Nilai Konstanta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar -.391 yang menyatakan jika variabel Penerapan Akuntansi Sektor

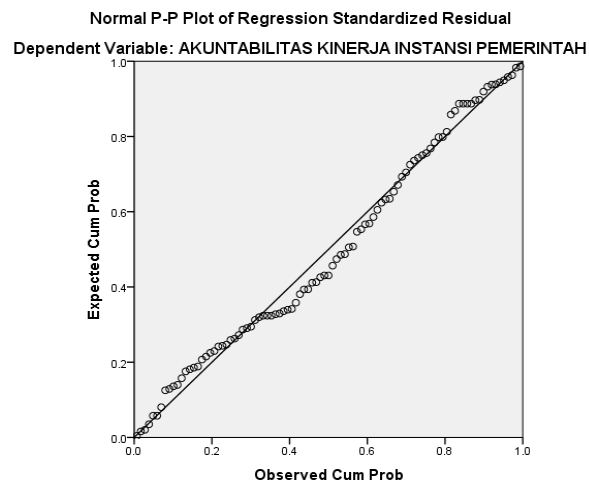
Publik (X1), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) sama dengan nol, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar -.391.

- 2) Nilai koefisien regresi (b_1) untuk variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) dalam penelitian ini sebesar 0.368. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan satu kesatuan penerapan akuntansi sektor publik, maka di asumsikan jika nilai konstanta tidak berubah maka variabel penerapan akuntansi sektor publik akan memberikan dampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0.368.
- 3) Nilai koefisien regresi (b_2) untuk variabel Pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) dalam penelitian ini sebesar 0.731. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan satu kesatuan pelatihan, maka di asumsikan jika nilai konstanta tidak berubah akan memberikan dampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0.731.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak (Siregar, 2014). Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018).



Gambar 4. Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan grafik normal plot di atas ini, kita dapat melihat bahwa tidak menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Pengujian ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dengan nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan multikolinieritas yaitu nilai tolerance < 0.10 atau nilai VIF > 10 (Ghozali, 2015).

Tabel 21
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

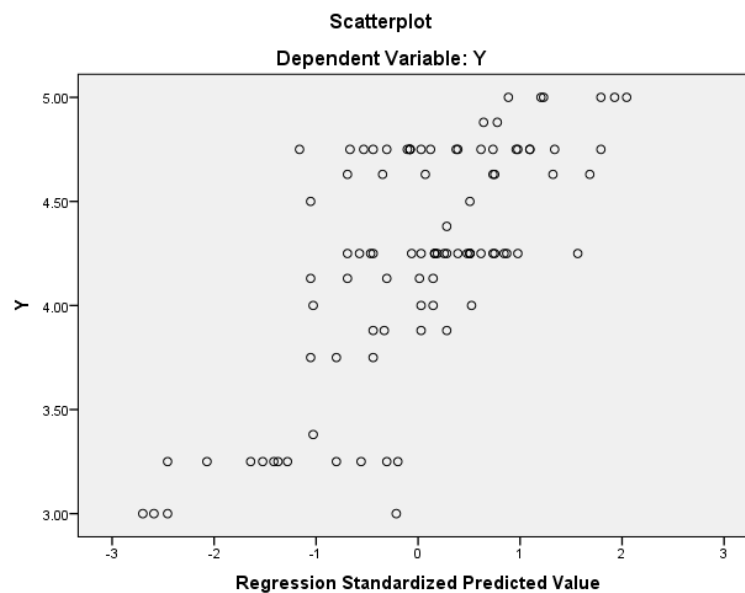
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	.769	1.301
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	.769	1.301

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinieritas variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai VIF 1.301 dan nilai *tolerance* sebesar 0.769 dan pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki nilai VIF 1.301 dan nilai *tolerance* sebesar 0.769. Dari kedua variabel tersebut semua nilai toleransi berada di atas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah dimana terjadinya ketidaksamaan varian dan residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas menyebabkan penaksir atau estimor menjadi tidak efisien dan nilai koefisien akan menjadi sangat tinggi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar pada pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.



Gambar 4. Scatterplot

Berdasarkan gambar uji scatterplot diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik data menyebar diatas, dibawah dan sekitaran angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas dan dibawah saja.

6. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel-variabel independen yang ada dalam model regresi secara individu terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0.05. Jika nilai *probability t* kurang dari 0.05 maka H_a diterima dan H_o ditolak, dan apabila jika nilai *probability t* lebih dari 0.05 maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Tabel 22
Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error	Betta		
1	(Constant)	-.391	.511		-.765	.446
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	.368	.127	.241	2.896	.005
	Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	.731	.107	.568	6.829	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan hipotesis pertama (H1), Penerapan Akuntansi Sektor Publik(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diterima. Hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi pada variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) yaitu sebesar 2.896 dengan nilai taraf signifikan $0.005 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dengan kata lain H_1 diterima.

2) Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan hipotesis kedua (H2), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diterima. Hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi pada variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) yaitu sebesar 6.829 dengan nilai taraf signifikan $0.000 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dengan kata lain H₂ diterima.

b. Uji F

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh dari seluruh variabel independen yang ada dalam model regresi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0.05. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_a diterima.

**Tabel 23 Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.425	2	7.712	48.152	.000 ^b
	Residual	14.735	92	.160		
	Total	30.160	94			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2), Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan dari hasil uji Anova atau F terlihat bahwa nilai F sebesar 48.152 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, karena probabilitas atau nilai sig menunjukkan 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen

Tabel 24
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.715 ^a	.511	.501	.40021

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2), Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Koefisien Korelasi (R) sebesar 0.715 atau 71,5% menunjukkan bahwa korelasi variabel independen dengan variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) erat kaitannya dengan variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1), dan pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) serta bernilai positif dan mendekati 1.

Koefisien determinasi R Square sebesar 0.511 atau 51,1% yang menunjukkan bahwa variasi dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(Y), dapat dijelaskan oleh penerapan akuntansi sektor publik (X1), dan pengawasan kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 48,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hipotesis pertama, Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diterima. Hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi pada variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik yaitu sebesar 2.896 dengan nilai taraf signifikan $0.005 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Bastian (2011) yang dimana kinerja organisasi dapat diraih

dengan mengefektifkan dan mengefesienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggung jawaban publik.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas (2012) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Dimana dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan.

Hal ini disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan akuntansi sektor publik pada suatu instansi pemerintah, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan kualitas LKPD di Kabupaten Morowali Utara yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana sebelumnya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2014-2015 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dalam artian laporan keuangan pemerintah daerah berada di urutan terbawah dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Kenaikan kualitas LKPD tersebut dikarenakan pemerintah daerah mendorong OPD di setiap instansi guna melakukan perbaikan diantaranya

melakukan inventarisasi, serta melakukan pengembalian dana atas ketekoran kas dan kelebihan pembayaran belanja modal dan belanja barang dan jasa. Tentunya menjadi suatu keberhasilan dan kebanggaan bagi Kabupaten Morowali Utara dalam mengelola keuangan dan asset daerah secara transparan dan akuntabel.

2. Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Utara (OPD) Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hipotesis kedua, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diterima. Hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi pada variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan yaitu sebesar 6.829 dengan nilai taraf signifikan $0.000 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki korelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudianto (2005) yang menyatakan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Haiqal (2009) yang menyatakan hal yang sama. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pada LKPD Kabupaten Morowali Utara, maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, social dan politik. Suatu instansi pemerintah sudah pasti diawasi oleh pihak internal dan eksternal dalam setiap proses pencapaiannya, namun sistem pengawasan internal instansi pun mutlak menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Dilihat dari hasil Opini LKPD tahun 2014-2015, Kabupaten Morowali Utara memperoleh TMP yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana hasil tersebut merupakan urutan terbawah dalam penilaian LKPD.

Hal tersebut dikarenakan, masih banyak laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah tidaklah memenuhi karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan, hal ini akan sangat menghambat terwujudnya akuntabilitas kinerja dan hal ini akan membuat proses kerja instansi tidak sesuai dengan azas pengelolaan keuangan

pemerintah yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 atau yang telah direvisi menjadi Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 yang harus dilaksanakan dengan tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Morowali Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F sebesar 48.152 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, karena probabilitas atau nilai sig menunjukkan 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gea, I. R. (2021) dengan hasil penelitian “(1) Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2) Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3) Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan

Kualitas Laporan Keuangan memberi pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat melaksanakan survey lapangan, masih ada beberapa instansi yang dalam proses keuangannya masih terdapat kendala, salah satunya adalah sumber daya manusia yang tidak berkompeten di bidangnya atau tidak sepenuhnya paham tentang bagaimana tata cara dalam membuat sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005.

Beberapa aparatur pemerintah pun kurang memahami pentingnya pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditakutkan akan menyebabkan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah tidak memenuhi karakteristik kualitatif dari sebuah laporan keuangan, sehingga proses pengambilan keputusan pun akan menjadi sulit. Kendala semacam inilah kemudian yang menyebabkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah sulit untuk dicapai.

Uraian sebelumnya tentang beberapa kendala yang dialami oleh LKPD Kabupaten Morowali Utara telah memperlihatkan bahwa tingkat pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah belum maksimal. Untuk itu sangat diharapkan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten morowali Utara untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh instansi OPD yang

ada di daerahnya, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja tiap-tiap OPD khususnya di bagian keuangan guna menciptakan akuntabilitas publik yang lebih baik.